

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016 - 2021**





BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5758 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Dinas Perikanan Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
  - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
  - b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
NOMOR 85 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016 - 2021**

DAFTAR ISI

HAL

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 5758/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ..... iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.3.1 Maksud ..... 4

1.3.2 Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG ..... 5

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung ..... 5

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Badung ..... 11

2.2.1 Jumlah Pegawai..... 11

2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) ..... 12

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung ..... 18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..... 21

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 21

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 23

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali..... 25

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 29

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 35

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ..... 38

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung ..... 38



4.2	Strategi dan Kebijakan .....	40
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	42
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SEMESTA BERENCANA.....	58
BAB VII	PENUTUP .....	62

# DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016 .....	11
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016 .....	12
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung .....	15
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung .....	17
Tabel 3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung .....	30
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung .....	39
Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021.....	41
Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Perikanan Badung .....	43
Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Perikanan Kabupaten Badung .....	49
Tabel 5.3 Indikasi Rencana Program Strategis yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Badung .....	54
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana.....	58
Tabel 6.2 Tujuan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Badung .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dimana daerah diberi otonomi yang luas dalam bentuk pemberian kewenangan yang besar dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan prima sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana pembangunan tahunan meliputi 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta berintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Badung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016. Uraian tugas dan fungsi Dinas Perikanan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat (Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. Keuangan), Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Seksi Penyusunan Program, Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan, Seksi Pengkajian dan Pengembangan), Bidang Produksi dan Sarana Perikanan (Seksi Perikanan Tangkap, Seksi Perikanan Budidaya, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan), Bidang

Pemberdayaan dan Usaha Perikanan (Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing, Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir, Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya). Disamping itu juga ada Unit Pelayanan Teknis (UPT BBI dan UPT PPI) serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut agar dapat mencapai sasaran pembangunan perikanan yang baik, tepat dan terarah maka diperlukan adanya Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tahun 2016–2021.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Landasan Idiil  
Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional  
Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional
  - a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang perikanan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perikanan.
- b. Sebagai acuan dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perikanan kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu;
- d. Sebagai dasar tolok ukur dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung;

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 ini diawali dengan kata pengantar dan selanjutnya dibagi dalam beberapa Bab, yang meliputi :

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Bab I   | : | Pendahuluan   |
| Bab II  | : | Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung   |
| Bab III | : | Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi  |
| Bab IV  | : | Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan  |
| Bab V   | : | Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif                       |
| Bab VI  | : | Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana |
| Bab VII | : | Penutup   |

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang perikanan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan perikanan
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan perikanan

Sedangkan susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariats terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan Program ;
  - b. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan ;
  - c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan ;
4. Bidang Produksi dan Sarana Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Perikanan Tangkap ;
  - b. Seksi Perikanan Budidaya ;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan ;
5. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing ;
  - b. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir ;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya ;
6. Unit Pelaksana Teknis ;
  - a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikanan Kabupaten Badung ;
  - b. Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan Kabupaten Badung ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
- d) Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Merumuskan usulan rencana kerja anggaran Dinas dari masing – masing bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan;
- f) Menetapkan pelaksanaan program kerja Dinas, laporan kinerja dan capaian program/kegiatan;
- g) Mengkoordinir pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data informasi pengelolaan pembudi daya ikan;
- h) Menetapkan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perikanan;
- i) Menetapkan pengawasan secara terkoordinasi kepada pelaku usaha pengolahan dalam rangka penerapan teknologi pengolahan dan sertifikasi untuk meningkatkan mutu hasil perikanan;
- j) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- k) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- n) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- o) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a) Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- b) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
- g) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- h) Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- i) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- k) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- m) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- n) Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- o) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f) Merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan data dan penyusunan laporan kinerja serta capaian program/kegiatan evaluasi ;
- g) Merencanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data informasi pengelolaan pembudi daya ikan;
- h) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- l) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Produksi dan Sarana mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - f) Merencanakan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di bidang perikanan;
  - g) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan ;
  - h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan pengendalian pembenihan ikan;
  - i) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan dilaut dan perairan umum;
  - j) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman bimbingan/penyuluhan penerapan pola produksi perikanan;
  - k) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan operasional pengawasan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - l) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - m) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
  - p) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
  - r) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
  - f) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada pelaku usaha pengolahan dalam rangka penerapan teknologi pengolahan dan sertifikasi untuk meningkatkan mutu hasil perikanan;
  - g) Menyusun pedoman usaha pengolahan pemasaran dan daya saing;
  - h) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil meliputi analisa pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi pemasaran hasil perikanan;
  - i) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha perikanan;
  - j) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan penerapan pola kerjasama /kemitraan usaha perikanan;
  - k) Mengkoordinasikan perencanaan tata ruang pengelolaan dan pemberdayaan pesisir;
  - l) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan serta penerapan teknologi pengelolaan dan pemberdayaan pesisir;
  - m) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan potensi kelembagaan dan sumberdaya perikanan;
  - n) Mengkoordinasikan penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis kelembagaan dan sumberdaya perikanan;
  - o) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan lomba kelompok usaha perikanan;
  - p) Mengkoordinasikan kegiatan fungsional di bidang perikanan;
  - q) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum;
  - r) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - s) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- t) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- v) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
- x) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Badung

2.2.1 Jumlah Pegawai

Dalam Tahun 2016 jumlah pegawai yang mendukung kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Badung sebanyak 75 orang, termasuk pegawai BBI Dinas Perikanan Kabupaten Badung, PPI Dinas Perikanan Kabupaten Badung, dengan rincian sebagai berikut :

- PNS Daerah : 74 orang
- THL / Honorer Pemda. Badung : 1 orang

Secara rinci potensi sumberdaya yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Perikanan  
Kabupaten Badung Tahun 2016

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan							
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SM	DIP	SMA	SMP	SD	THL
1.	Ka Dinas	1				1					1						
2.	Sekretaris Dinas a. Kasubag Umum b. Kasubag Keuangan c. Staf			1	1	1	1	14	2	1	1			14	1	1	
3.	Kabid. Perencanaan dan Pengembangan a. Kasi Penyusunan Program b. Kasi Data, Evaluasi dan Pelaporan c. Kasi Pengkajian dan Pengembangan d. Staf			1	1	1	1			1	1			1			
4.	Kabid. Produksi dan Sarana a. Kasi Perikanan Budidaya b. Kasi Perikanan Tangkap c. Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan d. Staf			1	1	1	1	6		1	1			6			
5.	Kabid. Pemberdayaan dan Usaha Perikanan a. Kasi Kelembagaan dan Usaha Perikanan b. Kasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir c. Kasi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saling d. Staf			1	1	1				1							
6.	Unit Pelayanan Teknis (UPT) a. Kepala UPT BBI Diskan Kab. Badung b. Kepala UPT PPI Diskan Kab. Badung c. Kasubag TU UPT BBI Kec. Mengwi dan Petang d. Kasubag TU UPT PPI Kec. Kuta dan Kuta Selatan e. Staf				1	1	1				1						
7.	Petugas Fungsional (Penyuluh)					2	4				1		2				

**2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)**

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Perikanan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Dinas Perikanan ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2  
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	Sepeda Motor	39	28		11
2	Gerobak Dorong	6	X		
3	Perahu Karet Bermotor	3			X
4	Mesin Bubut	2			X
5	Pakaian Kerja	5	X		
6	Timbangan	1			X
7	Mesin Tepung	1			X
8	Penggiling Pelet	1	X		
9	Alat Pengolahan Limbah	7			X
10	Kontainer	9	X		
11	Pompa Air	1			X
12	Sprayer	1	X		
13	Socase/Shoda	1			X
14	Mesin Penghancur Pakan	2	X		
15	Mesin Pelet	2	X		
16	Kesin Ketik Besi	23	X		
17	mesin Ketik Besi	9			X
18	Mesin Ketik Elektrik	2	X		
19	Mesin Ketik Elektri	2			X
20	Mesin Absen	1	X		
21	Calculator	12			X
22	Lemari Besi	1			X
23	Lemari Besi	5	X		
24	Rak Besi	3			X
25	Rak Besi	1		X	
26	Rak Kayu	24			X
27	Rak Kayu	30	X		
28	Filing Kabinet	5			X
29	Filing Kabinet	18	X		
30	Brankas	3	2		1
31	Rak Kaca	1	X		
32	Lemari Kaca	25	X		
33	Lemari Kayu	33	29	1	3
34	Papan Perda	2	X		
35	Papan Nama Dinas	10	X		
36	Papan Pengumuman/Informasi	24	X		
37	White Board	16	X		
38	Overhead Projektor	2	X		
39	Meja Komputer	1			X
40	Meja Komputer	17	X		
41	Kursi Kayu	69	X		
42	Meja Rapat	54	X		
43	Meja Telpon	6	X		

44	Kursi Rapat	150	X		
45	Kursi Putar	11	X		
46	Kursi Lipat	176	150	26	
47	Sofa	19	X		
48	Meja Pingpong	2	1	1	
49	Sekat Ruangan	1	X		
50	Meja Konter	1	X		
51	Mesin Potong Rumput	8	X		
52	Lemari Es	14	X		
53	Kipas Angin	1	X		
54	Freezer	27	X		
55	Tabung Gas	1	X		
56	Televisi	4	3	1	
57	Wireless	8	7	1	
58	Wireless	2			X
59	Stabilisator	10		X	
60	Camera Film	2	X		
61	Camera Digital	5	X		
62	Handy Cam	1	X		
63	Komputer PC	33	20	13	
64	Komputer PC	6			X
65	Komputer PC	1		X	
66	Lap Top	30	X		
67	Note Book	2	X		
68	Printer	39	28		11
69	Printer	4			X
70	UPS	1	X		
71	Wireless Modem	5	X		
72	Meja Biro	16	7	9	
73	Meja ½ Biro	244	X		
74	Meja Kerja ½ Biro	244	X		
75	Kursi Kerja	71	X		
76	Meja Rapat	3	X		
77	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	15	X		
78	Telepon	20	18		2
79	Faximile	1	X		
80	AC Split	24	X		
81	Mobil Pick Up	1		X	
82	HT	7		X	

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, Dinas memiliki sarana prasarana seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 2 unit, Pos Pengawas TPI dan PPI, Pasar Ikan Hygienis dan kantor pusat.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Perikanan Kabupaten Badung cukup besar karena menangani bidang pelayanan yaitu pelayanan pada unsur kelautan dan perikanan. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut perlu didukung oleh SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta dukungan anggaran baik dari APBD II, APBD I maupun APBN.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.



Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Produksi perikanan (ton)				37.239,40	50.323,80	59.929,40	5.002,03	5.061,87	38.386,30	48.564,00	49.099,32	6.619,50	6.760,62	231,4%	96,5%	81,9%	132,3%	133,6%
2	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)				31,00	31,50	32,00	32,40	32,70	30,91	31,10	32,20	32,87	32,89	99,7%	98,7%	100,6%	101,5%	100,6%
3	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton)				3.255,50	3.781,40	4.138,40	4.500,00	4.650,00	3.255,50	3.781,40	4.184,40	4.530,50	4.866,22	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	104,7%
4	Produksi Pemasaran Komoditi Perikanan (ton)				8.170,00	8.333,00	8.500,00	8.670,00	8.843,00	7.753,33	8.333,0	8.501,00	8.675,00	9.233,50	94,9%	100,0%	100,0%	100,1%	104,4%

Tabel 2.3  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi perikanan (ton)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Capaian realisasi anggaran dinas	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan  
 Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah)																	
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	16.209.953	25.865.500	34.871.402	30.624.329	28.930.260	14.704.014	22.142.861	32.097.100	27.943.986	25.261.468	90,71	85,61	92,04	91,25	87,32	1.527.111	2.639.364
Belanja Langsung	4.829.357	12.287.759	21.251.640	15.574.136	12.146.038	4.685.468	11.080.480	19.432.608	14.236.440	10.581.701	97,02	90,17	91,44	91,41	87,12	1.904.170	1.474.058
Belanja Modal	1.408.829	4.443.102	9.662.461	945.886	809.041	1.377.876	4.074.619	8.381.470	849.376	777.205	97,80	91,71	86,74	89,80	96,06	(149.947)	(150.168)
Belanja Barang Jasa	3.298.200	7.636.750	11.272.313	14.319.416	11.098.670	3.192.282	6.809.389	10.760.663	13.096.353	9.588.008	96,77	89,17	95,46	91,46	86,39	3.560.491	1.598.932
Belanja Pegawai	122.328	207.907	316.566	308.834	238.326	115.310	196.472	290.476	290.712	216.489	94,26	94,50	91,76	94,13	90,84	29.000	25.295
Belanja Tidak Langsung	11.380.596	13.577.741	13.619.763	15.050.193	16.784.222	10.018.546	11.062.381	12.664.492	13.707.548	14.679.767	88,03	81,47	92,99	91,08	87,46	1.350.907	1.165.305
Total Belanja Daerah	16.209.953	25.865.500	34.871.402	30.624.329	28.930.260	14.704.014	22.142.861	32.097.100	27.943.986	25.261.468	90,71	85,61	92,04	91,25	87,32	1.527.111	2.639.364

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung**

Dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Badung masih dihadapkan pada tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

### **a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik**

Tata ruang peruntukan sektor perikanan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan perikanan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.

Disamping itu adanya kecenderungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor perikanan serta sulitnya melakukan investasi.

### **b. Terbatasnya permodalan**

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun industri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya.

### **c. Daya saing produk hasil perikanan**

Pemasaran produk perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan dan pembudidaya ikan). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan masih lemah, yaitu *pertama*, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (*preference*) para konsumen. *Kedua*, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

### **d. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan**

Pendapatan/penghasilan pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana

produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil perikanan.

**e. Terjadinya alih profesi**

Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan kecenderungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh profesi ke sektor pariwisata.

**f. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu**

Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha budidaya ikan termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha budidaya ikan dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan tingkat produksi.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung ke depan sebagai berikut :

**a. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung belum dimanfaatkan secara optimal.**

Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya yang dapat pulih/diperbaharui (*renewable resources*) yang meliputi sumberdaya ikan, hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun ; sumberdaya tidak dapat pulih/diperbaharui (*non-renewable resources*) yang meliputi mineral, tambang, energy kelautan, serta jasa kelautan seperti transportasi dan pariwisata.

Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947 ton/tahun, tahun 2016 baru dimanfaatkan sebesar 6.451,05 ton (6,97%). Lahan potensi budidaya laut (rumput laut) diperkirakan  $\pm$  95 Ha, baru dimanfaatkan  $\pm$  8,7 Ha (9,1%), sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam  $\pm$  52 Ha baru dimanfaatkan  $\pm$  39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi  $\pm$  15 Ha belum dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi  $\pm$  748 Ha baru dimanfaatkan sebesar  $\pm$  95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan  $\pm$  106 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai  $\pm$  5 Ha (4,7%).

Potensi sumberdaya perikanan sebagaimana diuraikan diatas, apabila dimanfaatkan dengan optimal, secara efisien dan efektif serta berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah daya dukung dan daya tampung dengan tetap memperhatikan lingkungan dan cara budidaya ikan yang baik akan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang dapat diandalkan dalam peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

**b. Tersedianya teknologi perikanan**

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang perikanan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM perikanan yang mempengaruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri perikanan serta pengembangan pasca panen.

**c. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat**

Keberhasilan pembangunan perikanan juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Badung cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang perikanan antara lain terbentuknya kelompok-kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN) dan kelompok-kelompok usaha penangkapan ikan serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya.

**d. Permintaan pasar akan produk perikanan**

Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasinya pariwisata di Indonesia dan Dunia, merupakan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju pembangunan khususnya di sektor perikanan. Potensi budaya (objek dan atraksi budaya) sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Badung akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perkembangan investasi, yang bertampak langsung terhadap meningkatnya permintaan produk hasil perikanan, serta peningkatan investasi di bidang perikanan pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sementara itu peningkatan permintaan dalam negeri terhadap produk hasil perikanan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang bergizi tinggi. Dengan meningkatnya pemenuhan protein hewani yang berasal dari ikan akan berdampak terhadap peningkatan gizi, kesehatan dan kecerdasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung**

Sesuai dengan Perda Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana terjadinya pemisahan SKPD yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, dimana sektor peternakan kemudian bergabung dengan Dinas Pertanian dan Pangan dan kewenangan urusan kelautan akan ditangani oleh Provinsi Bali, sedangkan sektor Perikanan berdiri sendiri menjadi Dinas Perikanan. Sehingga saat ini Dinas Perikanan hanya memiliki kewenangan pada urusan perikanan.

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung antara lain :

##### **a. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Perikanan**

Secara umum tingkat profesionalisme/kualitas SDM perikanan masih kurang, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang menempati tugas tidak sesuai dengan kompetensinya. Disamping itu masih kurangnya pelatihan / Diklat Teknis.

##### **b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan**

Data serta informasi tentang perikanan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu system jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan perikanan ketersediaan data yang akurat dan tidak kedaluarsa menjadi salah satu factor penting. Statistik Perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi perikanan serta sosial ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan bagi pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah :

**a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik**

Tata ruang peruntukan sektor perikanan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan perikanan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.

Disamping itu adanya kecenderungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor perikanan serta sulitnya melakukan investasi.

**b. Terbatasnya permodalan**

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun industri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya.

**c. Daya saing produk hasil perikanan**

Pemasaran produk perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua factor utama yang membuat pemasaran produk perikanan masih lemah, yaitu *pertama*, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (*preference*) para konsumen. *Kedua*, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

**d. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan**

Pendapatan/penghasilan pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil perikanan.



**e. Terjadinya alih profesi**

Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan kecenderungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh prosi ke sektor pariwisata.

**f. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu**

Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha budidaya ikan termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha budidaya ikan dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan tingkat pendapatan.

**g. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan**

Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947 ton/tahun, tahun 2016 baru dimanfaatkan sebesar 6.451,05 ton (6,97%). Lahan potensi budidaya laut (rumput laut) diperkirakan  $\pm$  95 Ha, baru dimanfaatkan  $\pm$  8,7 Ha (9,1%), sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam  $\pm$  52 Ha baru dimanfaatkan  $\pm$  39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi  $\pm$  15 Ha belum dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi  $\pm$  748 Ha baru dimanfaatkan sebesar  $\pm$  95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan  $\pm$  106 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai  $\pm$  5 Ha (4,7%).

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders)

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, akan dilaksanakan melalui upaya-upaya dengan 9 (Sembilan) misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Untuk mencapai visi diperlukan adanya rumusan upaya-upaya sesuai dengan sektor pembangunan di masing-masing Satuan Perangkat Daerah melalui misi pembangunan di bidang perikanan serta dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang perikanan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan perikanan
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan perikanan

Secara umum tugas Dinas Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-9 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :

**"Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya"**

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di bidang perikanan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-9 pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 tersebut adalah:

**Tujuan 1** : Meningkatkan Ketersediaan Pangan

**Sasaran** : 1. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

**3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali**

**Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 adalah **"Wujudkan Sektor Kelautan Dan Perikanan Indonesia Yang mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional"**.

*Mandiri* dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. *Maju* dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. *Kuat* diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. *Berbasis kepentingan nasional* dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yaitu Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam upaya :

- a. Kedaulatan (Sopereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan
- b. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- c. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- a. Kedaulatan (Sovereignty), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- b. Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
  3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
  4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
  5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
- c. Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
  6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
  7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:

1. Stakeholders Prespective Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP", dengan Indikator Kinerja:
  - a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
  - b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.
2. Customer Perspective Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:
  - a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
  - b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019;
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019;
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019;

- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019;
  - e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019;
  - f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019; dan
  - g. Persentase peningkatan PNPB dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.
3. Internal Process Perspective Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni:
- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
  - b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
  - c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
    - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
    - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
4. Learning and Growth Perspective (input) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
  - b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
  - c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja

Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.

- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung tahun 2016 - 2021 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.

### **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali**

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : **“Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggung Jawab”**

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya
2. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah
3. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam;
2. Meningkatnya devisa negara dan pendapatan daerah dari ekspor hasil perikanan;
3. Meningkatnya konsumsi ikan;
4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan ekosistem perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil;

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018, dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 89.758,59 ton pada tahun 2014 menjadi 97.157,58 ton pada tahun 2018
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 102.465,4ton pada tahun 2014 menjadi 129.360,21ton pada tahun 2018
3. Meningkatnya produksi olahan dari 36.586,96 ton pada tahun 2014 menjadi 46.190,19 ton pada tahun 2018
4. Meningkatnya produksi garam dari 5.231,85 ton pada tahun 2014 menjadi 6.359,35 ton pada tahun 2018

5. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari 130.000.000 US\$ pada tahun 2014 menjadi 135.200.000 US\$ pada tahun 2018
6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 1.580.720.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.300.000.000,- pada tahun 2018
7. Meningkatnya konsumsi ikan dari 31,46 kg/kapita/tahun pada tahun 2014 menjadi 34,86 kg/kapita/tahun pada tahun 2018.
8. Meningkatnya jumlah pencadangan/penetapan kawasan konservasi perairan dari 1 kawasan pada tahun 2014 menjadi 5 kawasan pada tahun 2018

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bali maka dapat disimpulkan adanya keselarasan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bali dengan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Badung 2017 - 2021.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :

- a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional;
- b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan Sarbagita;
- c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional;
- d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;
- e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
- f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
- g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (“*bio-region*” dan/atau “*bio-geo-region*”).

Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Tabel 3.1  
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
1.	Meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah akibat kegiatan budidaya baik pertanian yang memanfaatkan bahan kimia guna meningkatkan produksi	I. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Badung mencakup :  1. Rencana pengembangan kawasan budidaya, dengan luas kurang lebih 39.602 Ha atau 94,62% dari luas wilayah  II. Kawasan Lindung 1. Kawasan lindung, mencakup : a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat;  2. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 15.224 atau 48,25% dari luas wilayah DAS Badung  3. Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat, mencakup: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sempadan waduk/estuary dam; dan  4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, mencakup : a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan  5. Kawasan lindung	1. Menurunnya kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat pencemaran air, udara dan tanah  2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam  4. Mempertahankan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan  5. Meminimalkan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi kegiatan budidaya non-pertanian  6. Terlestarikannya keanekaragaman hayati ekosistem laut dan terumbu karang	1. Berkurangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan pariwisata	I. Pengelolaan Lingkungan Hidup  •Penurunan kuantitas air disebabkan oleh faktor alam dan manusia dan factor utama adalah tingginya pemanfaatan air bawah tanah untuk kegiatan budidaya.  •Penurunan kualitas sumber daya air juga diikuti oleh penurunan kualitas air (debit air) akibat berkurangnya daerah resapan air.  II. Kualitas Lingkungan Hidup  Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak adanya keterpaduan antara kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dgn pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjadi konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas	1. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air.  2. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gondong, pembuatan kolam retensi.  3. Penerapan Sistem pengamanan abrasi pantai  4. Memanfaatkan SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.  5. Identifikasi dan pengembangan potensi SDA daerah.  6. Peningkatan kualitas SDA
2.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konservasi lingkungan					
3.	Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat kegiatan penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut dengan teknologi yang dapat merusak lingkungan					



No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
		<p>lainnya, mencakup :</p> <p>a. kawasan perlindungan plasma nutfah;</p> <p>b. kawasan perlindungan terumbu karang.</p> <p>c. kawasan perlindungan pulau-pulau kecil</p> <p>III. Kawasan Budidaya</p> <p>1. Kawasan budidaya, mencakup :</p> <p>a. kawasan peruntukan pertanian dengan luas kurang lebih 20.830 Ha;</p> <p>b. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;</p>			<p>tas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air dan kualitas air, udara dan atmosfer.</p> <p>II. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup</p> <p>Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam diman faatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuh an ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan an (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternasionalisasikan ke dalam kebijakan an dan peraturan perundang-an, terutama dalam mendorong inves tasi pembangun an jangka mene ngah (2011-2015). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengem bangan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendo-rong upaya perbaikan penge lolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>Namun demikian ber-bagai perma salah an muncul dan memicu terjadinya keru sakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikha watirkan akan berdam-pak besar bagi kehidup-an makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa perma salah an pokok yang terkait dengan sumber daya alam dan</p>	<p>dan LH</p> <p>7. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA.</p> <p>8. Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi</p> <p>9. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya</p> <p>10. Pelestarian ekosistem, pesisir dan laut</p> <p>11. Pelestarian ekosistem hutan bakau</p>

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
					<p>lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan permasalahan-permasalahan di atas, strategi pemba ngunan yang harus ditempuh adalah memper baik sistem pe ngelolaan sumber daya alam dan ling kungan hidup agar tercipta keseimbangan antara aspek pemanfa-atan sumber daya alam sebagai modal pertum buhan ekonomi (kontri-busi sektor pariwisata, pertambangan, perta-nian, perikanan, dan kehutanan, ter hadap PDRB) dengan aspek perlindungan terhadap keles tarian fungsi lingkungan hidup seba-gai penopang sistem kehidupan secara berke lanjutan.</li> </ul> <p>Adanya keseimbangan tersebut akan menjamin keberlanjutan pemba-ngunan, karenanya prinsip-prinsip pemba-ngunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor menjadi suatu keharusan. Yang di-maksud dengan sus-tainable development adalah upaya memenuhi kebutuhan gene-rasi masa kini tanpa mengorbankan kepen-tingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu me-nguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially accep-table) dan ramah lingkungan (environ-mentally sound). Prinsip tersebut harus dija-barkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perun-dangan lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.</p>	

- Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Badung dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :
- a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional, yang dijabarkan melalui strategi :
    - 1) menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

- 2) mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
  - 3) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
  - 4) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan
  - 5) meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan
- b. Keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita, dijabarkan melalui strategi :
- 1) memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Sarbagita;
  - 2) mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan perkotaan Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem perkotaan Sarbagita;
  - 3) mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
  - 4) mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang berjiwa budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.
- c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
  - 2) mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
  - 3) meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
  - 4) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan
  - 5) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
- d. Pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
  - 2) mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
  - 3) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air;

- 4) mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
  - 5) mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - 6) mengembangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi (KDTWKp) dan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata.
- e. Pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, yang dijabarkan melalui strategi:
- 1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
  - 2) mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan Sarbagita;
  - 3) mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
  - 4) melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan
  - 5) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar.
- f. Pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional;
  - 2) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;
  - 3) mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan;
  - 4) melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
  - 5) mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.
- g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dijabarkan melalui strategi :
- 1) mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
  - 2) mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 3) mengembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian yang berorientasi agribisnis;
  - 4) mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung Tengah dan wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah Badung Utara;
  - 5) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan
  - 6) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, yang dijabarkan melalui strategi :
- 1) mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
  - 2) mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - 3) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - 4) mengendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.

Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa:

- a. Mengidentifikasi rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan ;
- b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ;
- c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ;
- d. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program ;
- e. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

- a. Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Perikanan Kabupaten Badung dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan perikanan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia menjadikan pembangunan

perikanan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan perikanan yang akan dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Penguatan Sentra Komoditas Unggulan.

b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung antara lain :

- 1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan dengan Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Badung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung, sebagai berikut :

- 1) Implikasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, Dinas Perikanan bertugas menjabarkan program-program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
- 2) Implikasi terhadap indikasi program utama pemanfaatan ruang, Dinas Perikanan bertugas menjabarkan RTRW Kabupaten Badung dalam rangka :
  - a. perwujudan rencana tata ruang pembangunan perikanan wilayah Kabupaten Badung;
  - b. perwujudan kawasan strategis pembangunan perikanan Kabupaten Badung.
- 3) Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Perikanan bertugas merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Badung.

c. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

- Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan;
- Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;
- Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk;

- Menurunnya keanekaragaman hayati dan flasma nuftah;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, sebagai berikut :

- (1) Menghitung kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Perikanan;
- (2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- (3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- (4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- (6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

**BAB IV**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Sejalan dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam sebagai akibat dari meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya ilmu dan teknologi akan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam saat ini dan masa yang akan datang cendrung semakin besar. Di sisi lain , tuntutan untuk melestarikan sumberdaya juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya alam.

Perencanaan pembangunan perikanan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha perikanan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra
Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan	Jumlah produksi perikanan	36.476 ton
	Jumlah tingkat konsumsi ikan	33,01 kg/kapita/tahun

- Sasaran** : 1. Meningkatkan produksi perikanan
2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	7.021	7.154	7.293	7.433	7.575
	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	32,93	32,95	32,97	32,99	33,01
Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	80,5	81,5	82	82,5	83
	Capaian realisasi anggaran dinas (%)	96	96	96	97	97
Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.083	6.205	6.329	6.456	6.585



Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan	Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	7.021	7.154	7.293	7.433	7.575
			Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	32,93	32,95	32,97	32,99	33,01
		Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	80,5	81,5	82	82,5	83
			Capaian realisasi anggaran dinas (%)	96	96	96	97	97
		Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	6.083	6.205	6.329	6.456	6.585

## 4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Strategi 1** : Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan

Kebijakan :

- 1) Intenfikasi dan ekstensifikasi kegiatan usaha perikanan

- b. Strategi 2** : Pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan

Kebijakan :

- 1) Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk – produk perikanan

- c. Strategi 3** : Peningkatan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan

Kebijakan :

- 1) Peningkatan validitas data perikanan
- 2) Peningkatan reformasi birokrasi bidang perikanan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2**  
**Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung**  
**Tahun 2016 - 2021**

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan	1 Jumlah Peningkatan produksi perikanan (ton)	36.476	1 Meningkatkan produksi perikanan	1 Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	1 Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan usaha perikanan	1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
	2 Jumlah Peningkatan tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	33,01		2 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)		2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
						3 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	
			2 Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	1 Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	1 Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk-produk perikanan	4 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	
						1 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
						2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	
						3 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	
			3 Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan	1 Nilai akuntabilitas kinerja dinas	1 Peningkatan validitas data perikanan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				2 Capaian realisasi anggaran dinas	2 Peningkatan reformasi birokrasi bidang perikanan	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
						3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
						4 Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	
						5 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan	

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi perikanan
- b. Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan
- c. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 , Tabel 5.2 dan 5.3.

Tabel 5.1  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021  
Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir	
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
									Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1 Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan	1 Meningkatkan produksi perikanan	1 Jumlah produksi perikanan (ton)	2,05	2.01.2	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan  Kegiatan :  Pengelolaan BBI Kapal  Pengelolaan BBI Petang  Pembinaan dan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan  Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan  Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Penyakit Ikan  Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya  Rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan ikan di Kecamatan Petang  Peningkatan Operasional BBI Dinas Perikanan Kabupaten Badung  Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung  Pengadaan Keramba Jaring Apung  Pembangunan Kolam Ikan  Demo Plot Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok  Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi  Percontohan Teknologi Perikanan  Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung  Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar  Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan  Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Jumlah produksi perikanan budidaya	586.80 ton	598 ton	1.219,49	603 ton	2.043,40	611 ton	1.029,00	617 ton	1.875,97	623 ton	2.063,57	3.052,00	8.231,44		
			2,05	2.01.2	20		01	Jumlah BBI di Kapal yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	1 unit	57,68								1 unit	57,68		
		2,05	2.01.2	20	02		Jumlah BBI di Petang yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	1 unit	39,95									1 unit	39,95		
		2,05	2.01.2	20	03		Jumlah kelompok pembudidaya ikan/nelayan yang dinilai dan dibina	24 kelompok	5 katagori + 8 kelompok	84,96									5 katagori 8 kelompok	84,96		
		2,05	2.01.2	20	04		Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan teknis budidaya		30 orang	34,31			30 orang	40,00	30 orang	42,00	30 orang	46,20	120 orang	162,51		
		2,05	2.01.2	20	05		Jumlah Sampel Ikan dan Air Kolam yang diuji di laboratorium	100 kelompok	30	33,61	30	70,15	30	80,00	30	88,00	30	96,80	150 sampel	368,56		
		2,05	2.01.2	20	06		Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	19 kelompok	3 kelompok	151,31									3 kelompok	151,31		
		2,05	2.01.2	20	06		Jumlah rehabilitasi kolam dan pengadaan sarana prasarana pokok perbenihan ( rehab kolam dan pengadaan bak fiber glass )		1 unit	817,68									1 unit	817,68		
		2,05	2.01.2	20	06		Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional				26 petak kolam (4000 m2)	101,55	26 petak kolam (4000 m2)	120,00	26 petak kolam (4000 m2)	180,00	26 petak kolam (4000 m2)	198,00	26 petak kolam (4000 m2)	599,55		
							Jumlah peserta temu teknis kelompok pembudidaya ikan				30 orang	8,09	30 orang	9,00	30 orang	9,90	30 orang	10,89	120 orang	37,88		
		2,05	2.01.2	20	xx		Jumlah Pengadaan Keramba Jaring Apung				1 paket	91,20			1 paket	100,32	1 paket	110,36	3 paket	301,89		
		2,05	2.01.2	20	xx		Jumlah Pengadaan Sarana Perikanan Budidaya				10 unit	357,77			10 unit	393,54	10 unit	432,90	30 unit	1.184,21		
		2,05	2.01.2	20	xx		Jumlah demplot pengembangan budidaya lele dengan sistem bioflok				3 paket	100,03							3 paket	100,03		
		2,05	2.01.2	20	xx		Luas Areal Pengembangan Minapadi				2 Ha	101,12			2 Ha	115,00	2 Ha	126,50	6 Ha	342,62		
		2,05	2.01.2	20	xx		Jumlah Lokasi Percontohan aplikasi Teknologi Perikanan				4 Kecamatan	206,48	4 Kecamatan	230,00	4 Kecamatan	253,00	4 Kecamatan	278,30	4 Kecamatan	967,78		
		2,05	2.01.2	20	xx		Jumlah Balai Benih Ikan yang ditata				1 unit	257,52							1 unit	257,52		
		2,05	2.01.2	20	xx		Jumlah pengadaan paket perikanan budidaya				30 paket	719,49	2 paket	550,00	2 paket	605,00	2 paket	665,50	36 paket	2.539,99		
		2,05	2.01.2	20	03		Jumlah kelompok yang dibina								13 kelompok	89,205	13 kelompok	98,125	39 kelompok	187,33		
		2,05	2.01.2	20	xx		Jumlah DED yang Disusun				1 dokumen	30,00							1 dokumen	30,00		
			2,05	2.01.2	21	Program Pengembangan	Jumah Produksi perikanan	6.890,70 ton	6.423	645,87	6.551	1.712,15	6.682	1.776,00	6.816	17.397,60	6.952	19.137,36	33.424,00	40.668,97		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir				
									Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
			2,05	2.01.2	21	01	Perikanan Tangkap	tangkap															
							Kegiatan :																
							Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi Nelayan	Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan - jaring klitik - jukung - mesin motor tempel - pancing	1 paket  150 set 40 unit	1 paket  115 set 9 unit 27 unit 24 set	553,24	2 jenis	1.413,93	3 jenis	1.560,00	3 jenis	17.160,00	3 jenis	18.876,00	5 paket	39.563,17		
							Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir ( P3MP) Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan dan Pembinaan pada SPDN , TPI/PPI dan P3MP	-	3 Unit	5,17	2 Unit	4,91							2 Unit	10,08		
							Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan	Jumlah Pengadaan Papan Larangan	-	25 buah	87,46									25 buah	87,46		
							Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional		1 unit	180,89	1 unit	11,00	1 unit	12,10	1 unit	13,31	1 unit	217,30				
							Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan	Jumlah peserta Bimtek/pelatihan	15 orang	30 orang	81,97	15 orang	50,00	15 orang	55,00	15 orang	60,50	75 orang	247,47				
							Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Badung	Jumlah nelayan peserta temu teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan		100 orang	21,17						100 orang	21,17					
							Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya perikanan dan penebaran ikan di perairan umum (Restocking)	Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum		250.000 ekor	9,28	250.000 ekor	11,00	250.000 ekor	12,10	250.000 ekor	13,31	1 juta ekor	45,69				
							Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan dan Pengawasan Operasional Solar Packed Dealer Nelayan Kabupaten Badung	- Jumlah pengadaan papan larangan di tempat sepadan perairan umum - Pengawasan operasional SPDN Kabupaten Badung		20 buah	90,00	20 buah	99,00	20 buah	108,90	60 buah	297,90						
										2 SPDN		2 SPDN		2 SPDN		2 SPDN							
							Temu Teknis Nelayan Se-Kabupaten Badung	Jumlah nelayan peserta temu teknis Penangkapan Ikan		50 orang	12,00	50 orang	13,20	50 orang	14,52	150 orang	39,72						
							Bintek Pembuatan dan Pengoperasian Bubu Lipat bagi Kelompok Nelayan	Jumlah peserta bintek/ pelatihan		50 orang	42,00	50 orang	46,20	50 orang	50,82	150 orang	139,02						
							Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah produksi perikanan tangkap	6.890,70 ton	6.423	36,89	6.551	0,00	6.682	0,00	6.816	0,00	6.952	0,00	33.424,00	36,89		
							Kegiatan :																
Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Bagi Kelompok Nelayan	Jumlah peserta Bimtek/ pelatihan	30	15 orang	36,89										36,89									
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan	5 kelompok	4 kelompok	82,26	3 kelompok	0,00	3 kelompok	0,00	3 kelompok	0,00	3 kelompok	0,00	16 kelompok	82,26									
Kegiatan :																							
Pembinaan Penumbuhkembangan dan Lomba Pokmaswas	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan Jumlah kelompok yang dinilai	-	3 Kelompok  1 kelompok	82,26									3 kelompok  1 kelompok	82,26									
Program Pemberdayaan	Jumlah Kelompok			0,00	20	16,87	20	20,00	20	460,00	20	465,00	80	961,88									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir							
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021											
									Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta								
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)								
	2 Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	1 Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	2,05	2.01.2	xx	dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil	nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan			kelompok		kelompok		kelompok		kelompok		kelompok										
						Kegiatan :																						
											01	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	Jumlah kelompok yang dibina			50 kelompok	16,87	50 kelompok	20,00	50 kelompok	35,00	50 kelompok	40,00	200 kelompok	111,87			
												Jumlah kelas kelompok			3 kelas		3 kelas		3 kelas		3 kelas		3 kelas					
											02	Pelestarian Pura Segara sebagai Pura Swagina	Jumlah pura yang dilestarikan						17	425,00	17	425,00	51	850,00				
												Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Jumah Kawasan Pesisir yang tertata untuk menunjang pariwisata		1 kawasan	5.869,05	1 kawasan	12,80	1 kawasan	680,00	1 kawasan	1.463,00	2 kawasan	65,00	6 kawasan	8.089,85		
												Kegiatan :																
												03	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan	1 unit			2 Unit	620,00					2 unit	620,00			
												04	Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan	Jumlah pembangunan bangsal jukung nelayan	-	2 unit	5.869,05			2 unit	1.400,00			4 unit	7.269,05			
												xx	Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai	Jumlah Rapat Tim Terkait Manajemen Pengelolaan Pantai	-		5 kali	12,80						5 kali	12,80			
												xx	Gerakan Bersih Pantai	Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung	-	-		1 kali	60,00	1 kali	63,00	1 kali	65,00	3 kali	188,00			
												19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	2 kawasan	1 kawasan	1.689,85	2 kawasan	485,65	2 kawasan	670,00	2 kawasan	737,00	2 kawasan	810,70	2 kawasan	4.393,20	
													Kegiatan :															
												19	02	Festival Bahari di Kabupaten Badung	Jumlah Kegiatan Festival Bahari		1 kali	1.689,85						1 kali	1.689,85			
												19	3	Gerakan Budaya Perikanan	Jumlah Kegiatan Gerakan Budaya Perikanan Kabupaten Badung			6 kegiatan	485,65	6 kegiatan	670,00	6 kegiatan	737,00	6 kegiatan	810,70	24 kegiatan	2.703,35	
												26	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jumlah pemasaran produksi hasil perikanan	8.931 ton	9.325	50.998	9.371	42.298	9.417	165.000	9.464	181.500	9.511	199.650	47.088	623,042	
													Kegiatan :															
												26	1	Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pameran pengolahan hasil Perikanan yang diikuti dalam 1 tahun	14 paket	2 event	39,35	2 event	37,54	2 event	165,00	2 event	181,50	2 event	199,65	10 event	623,04
												26	2	Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang didata harga ikannya dalam 1 tahun anggaran	45 kali 12 pasar	3 pasar	11,65	3 pasar	4,75								
												23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5.062	8,25	5.164	6,19	5.267	0,00	5.372	0,00	5.480	0,00	26.345	14,44	
							Kegiatan :																					
						23	01	Pembinaan Usaha Perikanan	Jumlah Pengusaha, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar ikan yang dibina usahanya untuk mendapat kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kartu Kusuka)	40 pengusaha Pengusaha	40 Pengusaha	8,25	20 Pengusaha	6,19					60 Pengusaha	14,44								
						34	Program Peningkatan	Jumlah produksi	4.866,22 ton	5.063	5,46	5.164	52,22	5.267	55,00	5.373	60,50	5.480	66,55	26.347	239,73							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
									Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	3 Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan	1 Capaian realisasi anggaran dinas	2,05	2.01.2	01	Pengolahan Hasil Perikanan	pengolahan hasil perikanan	20 kelompok	15 kelompok	5,46	15 kelompok	5,43								30 kelompok	10,89
						Kegiatan :															
						Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolah yang dibina														
			2,05	2.01.2	xx	Gerakan Gemar Makan Ikan	Jumlah siswa SD yang mendapat sosialisasi manfaat makan ikan			465 orang	30,48	465 orang	35,00	465 orang	38,50	465 orang	42,35	1860 orang	146,33		
						Bimbingan teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan														
			2,05	2.01.2	xx	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan dan Bimbingan Teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan			30 orang	20,00	30 orang	22,00	30 orang	24,20	90 orang	66,20				
			2,01	2.01.2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	1.550,72	12 bulan	1.499,32	12 bulan	1.598,58	12 bulan	1.897,27	12 bulan	1.916,32	60 bulan	8.462,20	
						Kegiatan :															
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik														
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di KIR dan di Samsat																				
Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun																				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji tiap bulam dalam 1 tahun																				
Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor untuk kebutuhan selama 1 tahun																				
2,01	2.01.2	01	06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan blangko-blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	5 paket	1 paket	30,80	1 paket	22,40	1 paket	25,00	1 paket	27,50	1 paket	30,25	5 paket	135,95			
			07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan																
			08	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun																
			09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan																
2,01	2.01.2	01	10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan dalam 12 bulan	890 kotak	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak 768 Galon	34,22	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak 768 Galon	35,57	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak 120 Galon	40,00	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak 120 Galon	44,00	500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak 120 Galon	48,40	2.500 kotak, air 120 dus, gula 120 kg, kopi 60 kg, teh 60 kotak 1.896 galon 1.200 kotak	202,19			
				Jumlah makanan dan minuman Kegiatan yang disediakan dalam 1 tahun																	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		
										Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			2.01	2.01.2	01	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar Daerah dalam 1 tahun	5 paket	1 LS	225,00	1 LS	300,00	1 LS	330,00	1 LS	363,00	1 LS	399,30	5 LS	1.617,30	
			2.01	2.01.2	01	12	Penyediaan dekorasi	Jumlah bangunan yang didekorasi	7 kantor	5 kantor	13,69	4 bangunan	9,23	4 bangunan	11,00	4 bangunan	12,10	4 bangunan	13,31	4 bangunan	59,33	
			2.01	2.01.2	01	13	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan	81 kendaraan	26 kendaraan	278,15	26 kendaraan	320,76	26 kendaraan	330,00	26 kendaraan	363,00	26 kendaraan	399,30	26 kendaraan	1.691,21	
			2.01	2.01.2	01	14	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah bangunan yang disediakan aci - aci dan sesajen upacara selama 12 bulan	11 kantor	5 kantor	152,96	5 bangunan	161,54	5 bangunan	170,00	5 bangunan	187,00	5 bangunan	205,70	5 bangunan	877,20	
			2.01	2.01.2	01	15	Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Jumlah barang yang disediakan untuk menunjang kegiatan	5 paket	1 paket	15,00	1 kali	50,00	1 kali	55,00	1 kali	50,00	1 kali	50,00	5 kali	220,00	
			2.01	2.01.2	01	16	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengadaan sarana penganyaran pura kahyangan jagat	3 paket	1 kali	40,00	1 kali	86,04	1 kali	90,00	1 kali	99,00	1 kali	108,90	5 kali	423,94	
			2.01	2.01.2	01	017	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah paket jasa pengumuman lelang	-	6 paket	9,00	6 paket	9,00	6 paket	9,90	6 paket	10,89	6 paket	11,98	30 paket	50,77	
			2.01	2.01.2	01	018	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah dana untuk jasa pegawai tidak tetap	60 bulan	1 orang	63,23									1 orang	63,23	
			2.01	2.01.2	01	26	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan		6 orang	225,57	9 orang	295,76							9 orang	521,33	
			2.01	2.01.2	01	xx	Pemelaspasan BBI Baha	BBI yang dipelaspas							1 unit	150,00				1 unit	150,00	
			2.01	2.01.2	02		Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	665,53	100%	566,54	100%	30.907,51	100%	1.119,58	100%	783,92	100%	34.043,09	
							Kegiatan :															
			2.01	2.01.2	02	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	2 unit							1 unit mobil 2 unit sepeda motor	406,92			1 unit mobil 2 unit sepeda motor	406,92	
			2.01	2.01.2	02	02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	176 buah	46 buah, 1 set, 1 buah, 1 set, 1 paket	300,76			19 buah	75,00	47 buah	82,50	43 buah	90,75	180 buah	549,01	
			2.01	2.01.2	02	03	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	133 unit	18 unit	197,34	27 unit	303,85			32 unit	393,66	28 unit	433,02	129 unit	1.327,87	
			2.01	2.01.2	02	04	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang mendapatkan biaya pemeliharaan	1 unit	3 kantor	11,00	4 kantor	14,00	4 kantor	40,00	4 kantor	44,00	4 kantor	48,40	4 kantor	157,40	
			2.01	2.01.2	02	05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	81 kendaraan	25 kendaraan	80,34	26 kendaraan	109,94	26 kendaraan	120,00	26 kendaraan	132,00	26 kendaraan	145,20	26 kendaraan	587,49	
2.01	2.01.2	02	06	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor mendapat pemeliharaan	75 unit	58 unit	64,00	15 unit	21,00	15 unit	25,00	15 unit	27,50	15 unit	30,25	15 unit	167,75				
2.01	2.01.2	02	07	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	12 bulan	44 unit	12,10	60 unit	18,75	89 unit	30,00	89 unit	33,00	89 unit	36,30	89 unit	130,15				
2.01	2.01.2	02	xx	Review DED BBI Baha	Jumlah DED BBI Baha yang direview sesuai kebutuhan				1 dokumen	99,00							1 dokumen	99,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		
										Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2 Nilai akuntabilitas kinerja dinas	2.01	2.01.2	02	08	Pembangunan BBI Baha	Jumlah BBI yang dibangun					1 unit	30.617,51							1 unit	30.617,51
			2.01	2.01.2	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	260,08	6 jenis dokumen	234,88	6 jenis dokumen	255,00	6 jenis dokumen	268,50	6 jenis dokumen	282,75	6 jenis dokumen	1.301,22	
							Kegiatan :															
			2.01	2.01.2	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	48 orang	28 orang	251,55	27 orang	222,57	27 orang	240,00	27 orang	252,00	27 orang	264,60	27 orang	1.230,71	
			2.01	2.01.2	06	05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen saki yang tersusun : RKT PK IKU Lakip / LKjIP Casscading	120 exp	80 exp	8,54	80 exp	12,32	80 exp	15,00	80 exp	16,50	80 exp	18,15	400 exp	70,50	
			2.01	2.01.2	26		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 jenis	3 jenis	10,75	3 jenis	11,25	3 jenis	15	3 jenis	16,5	3 jenis	17,33	3 jenis	70,82	
							Kegiatan :															
			2.01	2.01.2	26	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	114 exp	60 exp	10,75	40 exp	11,25	60 exp	15,00	60 exp	16,50	60 exp	17,33	280 exp	70,82	
			2.05	2.01.2	30		Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	308,02	3 jenis dokumen	152,80	3 jenis dokumen	335,00	3 jenis dokumen	358,00	3 jenis dokumen	388,80	3 jenis dokumen	1.542,62	
							Kegiatan :															
			2.05	2.01.2	30	1	Penyusunan buku informasi perikanan	Jumlah buku Profil OPD dan buku saku yang dicetak	105 Eksp	105 Eksp	70,55	105 Eksp	26,53	105 Eksp	40,00	105 Eksp	44,00	105 Eksp	48,40	525 Eksp	229,48	
								Jumlah Monev yang dilaksanakan	12 kali	12 kali		18 kali		18 kali		18 kali		18 kali		84 kali		
			2.05	2.01.2	30	2	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	Jumlah pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya dan perikanan tangkap	1 dokumen	6 kecamatan	11,52	6 kecamatan	52,72	6 kecamatan	60,00	6 kecamatan	66,00	6 kecamatan	72,60	6 kecamatan	262,85	
			2.05	2.01.2	30	3	Pemetaan Potensi Wilayah Perikanan	Jumlah dokumen pemetaan potensi wilayah perikanan yang disusun	-	1 dokumen	225,94									1 dokumen	225,94	
			2.05	2.01.2	30	3	Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data pemetaan potensi wilayah perikanan yang terupdate		1 dokumen	48,94	1 dokumen	55,00	1 dokumen	50,00	1 dokumen	50,00	1 dokumen	50,00	4 dokumen	203,94	
2.01	2.01.2	06	xx	Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat di Bidang Perikanan	Jumlah laporan verifikasi proposal bantuan sosial yang tersusun				10 buku	24,61	10 buku	30,00	10 buku	33,00	10 buku	36,30	40 buku	123,91				
2.05	2.01.2	21	xx	Penghitungan Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Badung	Jumlah laporan nilai tukar nelayan yang disusun						10 dokumen	150,00	10 dokumen	165,00	10 dokumen	181,50	30 dokumen	496,50				

Tabel 5.3  
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021  
Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir		
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
									Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1 Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan	1 Meningkatkan produksi perikanan	1 Jumlah produksi perikanan (ton)	2,05	2.01.2	20	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>  Kegiatan :  Pengelolaan BBI Kapal  Pengelolaan BBI Petang  Pembinaan dan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan  Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan  Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Penyakit Ikan  Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya  Rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan ikan di Kecamatan Petang  Peningkatan Operasional BBI Dinas Perikanan Kabupaten Badung  Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung  Pengadaan Keramba Jaring Apung  Pembangunan Kolam Ikan  Demo Plot Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok  Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi  Percontohan Teknologi Perikanan  Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung  Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar  Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan  Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya</b>	<b>586.80 ton</b>	<b>598 ton</b>	<b>1.219,49</b>	<b>603 ton</b>	<b>2.043,40</b>	<b>611 ton</b>	<b>1.029,00</b>	<b>617 ton</b>	<b>1.875,97</b>	<b>623 ton</b>	<b>2.063,57</b>	<b>3.052,00</b>	<b>8.231,44</b>	
		2 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	2,05	2.01.2	20		01	Jumlah BBI di Kapal yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	1 unit	57,68							1 unit	57,68		
			2,05	2.01.2	20		02	Jumlah BBI di Petang yang mendapatkan biaya operasional	1 unit	1 unit	39,95							1 unit	39,95		
			2,05	2.01.2	20		03	Jumlah kelompok pembudidaya ikan/nelayan yang dinilai dan dibina	24 kelompok	5 katagori + 8 kelompok	84,96							5 katagori 8 kelompok	84,96		
			2,05	2.01.2	20		04	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan teknis budidaya		30 orang	34,31			30 orang	40,00	30 orang	42,00	30 orang	46,20	120 orang	162,51
			2,05	2.01.2	20		05	Jumlah Sampel Ikan dan Air Kolam yang diuji di laboratorium	100 kelompok	30	33,61	30	70,15	30	80,00	30	88,00	30	96,80	150 sampel	368,56
			2,05	2.01.2	20		06	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	19 kelompok	3 kelompok	151,31							3 kelompok	151,31		
			2,05	2.01.2	20		06	Jumlah rehabilitasi kolam dan pengadaan sarana prasarana pokok perbenihan ( rehab kolam dan pengadaan bak fiber glass )		1 unit	817,68							1 unit	817,68		
			2,05	2.01.2	20		06	Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional				26 petak kolam (4000 m2)	101,55	26 petak kolam (4000 m2)	120,00	26 petak kolam (4000 m2)	180,00	26 petak kolam (4000 m2)	198,00	26 petak kolam (4000 m2)	599,55
								Jumlah peserta temu teknis kelompok pembudidaya ikan				30 orang	8,09	30 orang	9,00	30 orang	9,90	30 orang	10,89	120 orang	37,88
			2,05	2.01.2	20		xx	Jumlah Pengadaan Keramba Jaring Apung				1 paket	91,20			1 paket	100,32	1 paket	110,36	3 paket	301,89
			2,05	2.01.2	20		xx	Jumlah Pengadaan Sarana Perikanan Budidaya				10 unit	357,77			10 unit	393,54	10 unit	432,90	30 unit	1.184,21
			2,05	2.01.2	20		xx	Jumlah demplot pengembangan budidaya lele dengan sistem bioflok				3 paket	100,03					3 paket	100,03		
			2,05	2.01.2	20		xx	Luas Areal Pengembangan Minapadi				2 Ha	101,12			2 Ha	115,00	2 Ha	126,50	6 Ha	342,62
			2,05	2.01.2	20		xx	Jumlah Lokasi Percontohan aplikasi Teknologi Perikanan				4 Kecamatan	206,48	4 Kecamatan	230,00	4 Kecamatan	253,00	4 Kecamatan	278,30	4 Kecamatan	967,78
			2,05	2.01.2	20		xx	Jumlah Balai Benih Ikan yang ditata				1 unit	257,52						1 unit	257,52	
			2,05	2.01.2	20		xx	Jumlah pengadaan paket perikanan budidaya				30 paket	719,49	2 paket	550,00	2 paket	605,00	2 paket	665,50	36 paket	2.539,99
			2,05	2.01.2	20		03	Jumlah kelompok yang dibina								13 kelompok	89,205	13 kelompok	98,125	39 kelompok	187,33
			2,05	2.01.2	20		xx	Jumlah DED yang Disusun				1 dokumen	30,00						1 dokumen	30,00	
			2,05	2.01.2	21			<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumah Produksi perikanan tangkap</b>	<b>6.890,70 ton</b>	<b>6.423</b>	<b>645,87</b>	<b>6.551</b>	<b>1.712,15</b>	<b>6.682</b>	<b>1.776,00</b>	<b>6.816</b>	<b>17.397,60</b>	<b>6.952</b>	<b>19.137,36</b>	<b>33.424,00</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir			
									Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			2.05	2.01.2	21	01	Kegiatan :															
							Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi Nelayan	Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan - jaring klitik - jukung - mesin motor tempel - pancing	1 paket  150 set 40 unit	1 paket  115 set 9 unit 27 unit 24 set	553,24	2 jenis	1.413,93	3 jenis	1.560,00	3 jenis	17.160,00	3 jenis	18.876,00	5 paket	39.563,17	
			2.05	2.01.2	21	02	Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir ( P3MP) Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan dan Pembinaan pada SPDN , TPI/PPI dan P3MP	-	3 Unit	5,17	2 Unit	4,91					2 Unit	10,08			
			2.05	2.01.2	21	05	Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan	Jumlah Pengadaan Papan Larangan	-	25 buah	87,46							25 buah	87,46			
			2.05	2.01.2	21	06	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional		1 unit	180,89	1 unit	11,00	1 unit	12,10	1 unit	13,31	1 unit	217,30			
			2.05	2.01.2	21	01	Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan	Jumlah peserta Bimtek/pelatihan	15 orang		30 orang	81,97	15 orang	50,00	15 orang	55,00	15 orang	60,50	75 orang	247,47		
			2.05	2.01.2	21	xx	Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Badung	Jumlah nelayan peserta temu teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan			100 orang	21,17						100 orang	21,17			
			2.05	2.01.2	21	xx	Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya perikanan dan penebaran ikan di perairan umum (Restocking)	Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum		250.000 ekor	9,28	250.000 ekor	11,00	250.000 ekor	12,10	250.000 ekor	13,31	1 juta ekor	45,69			
			2.05	2.01.2	21	xx	Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan dan Pengawasan Operasional Solar Packed Dealer Nelayan Kabupaten Badung	- Jumlah pengadaan papan larangan di tempat sepadan perairan umum - Pengawasan operasional SPDN Kabupaten Badung			20 buah	90,00	20 buah	99,00	20 buah	108,90	60 buah	297,90				
			2.05	2.01.2	21	xx	Temu Teknis Nelayan Se- Kabupaten Badung	Jumlah nelayan peserta temu teknis Penangkapan Ikan			50 orang	12,00	50 orang	13,20	50 orang	14,52	150 orang	39,72				
			2.05	2.01.2	21	xx	Bintek Pembuatan dan Pengoperasian Bubu Lipat bagi Kelompok Nelayan	Jumlah peserta bintek/ pelatihan			50 orang	42,00	50 orang	46,20	50 orang	50,82	150 orang	139,02				
			2.05	2.01.2	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah produksi perikanan tangkap	6.890,70 ton	6.423	36,89	6.551	0,00	6.682	0,00	6.816	0,00	6.952	0,00	33.424,00	36,89	
							Kegiatan :															
			2.05	2.01.2	15	1	Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Bagi Kelompok Nelayan	Jumlah peserta Bimtek/ pelatihan	30	15 orang	36,89									36,89		
			2.05	2.01.2	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan	5 kelompok	4 kelompok	82,26	3 kelompok	0,00	3 kelompok	0,00	3 kelompok	0,00	3 kelompok	0,00	16 kelompok	82,26	
							Kegiatan :															
			2.05	2.01.2	16	02	Pembinaan Penumbuhkembangan dan Lomba Pokmaswas	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan Jumlah kelompok yang dinilai	-	3 Kelompok	82,26								3 kelompok	82,26		
																			1 kelompok			
			2.05	2.01.2	xx		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil			0,00	20 kelompok	16,87	20 kelompok	20,00	20 kelompok	460,00	20 kelompok	465,00	80 kelompok	961,87	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																										
									Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir																
									Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta															
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)															
	2 Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	1 Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)				Kecil	yang diberdayakan																												
						Kegiatan :																													
						2,05	2.01.2														01	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	Jumlah kelompok yang dibina	50 kelompok	16,87	50 kelompok	20,00	50 kelompok	35,00	50 kelompok	40,00	200 kelompok	111,87		
						2,05	2.01.2														02	Pelestarian Pura Segara sebagai Pura Swagina	Jumlah pura yang dilestarikan	3 kelas		3 kelas		3 kelas		3 kelas		3 kelas			
						2,05	2.01.2														02	Pelestarian Pura Segara sebagai Pura Swagina	Jumlah pura yang dilestarikan				17	425,00	17	425,00	51	850,00			
						2,05	2.01.2														xx	Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Jumah Kawasan Pesisir yang tertata untuk menunjang pariwisata	1 kawasan	5.869,05	1 kawasan	12,80	1 kawasan	680,00	1 kawasan	1.463,00	2 kawasan	65,00	6 kawasan	8.089,85
						Kegiatan :																													
						2,05	2.01.2														03	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan	1 unit			2 Unit	620,00					2 unit	620,00	
						2,05	2.01.2														04	Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan	Jumlah pembangunan bangsal jukung nelayan	-	5.869,05			2 unit	1.400,00					4 unit	7.269,05
						2,05	2.01.2														xx	Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai	Jumlah Rapat Tim Terkait Manajemen Pengelolaan Pantai	-		5 kali	12,80					5 kali	12,80		
						2,05	2.01.2														xx	Gerakan Bersih Pantai	Pelaksanaan Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung	-	-			1 kali	60,00	1 kali	63,00	1 kali	65,00	3 kali	188,00
						2,05	2.01.2														19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	2 kawasan	1.689,85	2 kawasan	485,65	2 kawasan	670,00	2 kawasan	737,00	2 kawasan	810,70	2 kawasan	4.393,20
						Kegiatan :																													
						2,05	2.01.2														19	02 Festival Bahari di Kabupaten Badung	Jumlah Kegiatan Festival Bahari	1 kali	1.689,85									1 kali	1.689,85
						2,05	2.01.2														19	3 Gerakan Budaya Perikanan	Jumlah Kegiatan Gerakan Budaya Perikanan Kabupaten Badung			6 kegiatan	485,65	6 kegiatan	670,00	6 kegiatan	737,00	6 kegiatan	810,70	24 kegiatan	2.703,35
2,05	2.01.2	26	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan Kegiatan :	Jumlah pemasaran produksi hasil perikanan	8.931 ton	9.325	50,998	9.371	42,298	9.417	165,000	9.464	181,500	9.511	199,650	47.088	623,042																		
2,05	2.01.2	26	1 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pameran pengolahan hasil Perikanan yang diikuti dalam 1 tahun	14 paket	2 event	39,35	2 event	37,54	2 event	165,00	2 event	181,50	2 event	199,65	10 event	623,04																		
2,05	2.01.2	26	2 Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang didata harga ikannya dalam 1 tahun anggaran	45 kali 12 pasar	3 pasar	11,65	3 pasar	4,75																										
2,05	2.01.2	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan :	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5.062	8,25	5.164	6,19	5.267	0,00	5.372	0,00	5.480	0,00	26.345	14,44																		
2,05	2.01.2	23	01 Pembinaan Usaha Perikanan	Jumlah Pengusaha, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar ikan yang dibina usahanya untuk mendapat kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kartu Kusuka)	40 pengusaha Pengusaha	40 Pengusaha	8,25	20 Pengusaha	6,19							60 Pengusaha	14,44																		
2,05	2.01.2	34	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan Kegiatan :	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5.063	5,46	5.164	52,22	5.267	55,00	5.373	60,50	5.480	66,55	26.347	239,73																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir	
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.05	2.01.2		01	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolah yang dibina	20 kelompok	15 kelompok	5,46	15 kelompok	5,43							30 kelompok	10,89
			2.05	2.01.2		xx	Gerakan Gemar Makan Ikan	Jumlah siswa SD yang mendapat sosialisasi manfaat makan ikan				465 orang	30,48	465 orang	35,00	465 orang	38,50	465 orang	42,35	1860 orang	146,33
			2.05	2.01.2		xx	Bimbingan teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan				30 orang	16,31							30 orang	16,31
			2.05	2.01.2		xx	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan dan Bimbingan Teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan						30 orang	20,00	30 orang	22,00	30 orang	24,20	90 orang	66,20

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN  
BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  
RPJMD SEMESTA BERENCANA**

Didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2021
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah produksi perikanan (ton)	6.760,7	7.021	7.154	7.293	7.433	7.575	36.476
2	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)		32,93	32,95	32,97	32,99	33,01	33,01
3	Nilai akuntabilitas kinerja dinas		80,5	81,5	82	82,5	83	83
4	Capaian realisasi anggaran dinas		96	96	96	97	97	97
5	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)	4.866,22	6.083	6.205	6.329	6.456	6.585	31.658

Tabel 6.2  
Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran, Indikator Sasaran, Kinerja Utama, Rencana Program Kabupaten Badung

No.	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan	Bidang Penanggung Jawab
1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan	1 Jumlah produksi perikanan (ton) 2 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	36.476 33,01	1 Meningkatkan produksi perikanan	1 Jumlah produksi perikanan (ton) 2 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	2					URUSAN PILIHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
						2.05	2.01.2	20			<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>  Kegiatan :  Pengelolaan BBI Kapal Pengelolaan BBI Petang Pembinaan dan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Penyakit Ikan Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	Produksi dan Sarana Produksi dan Sarana Pemberdayaan dan Usaha Perikanan Produksi dan Sarana Pemberdayaan dan Usaha Perikanan Produksi dan Sarana
						2.05	2.01.2	20	001			
						2.05	2.01.2	20	002			
						2.05	2.01.2	20	003			
						2.05	2.01.2	20	004			
						2.05	2.01.2	20	005			
						2.05	2.01.2	20	006			
						2.05	2.01.2	21			<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>  Kegiatan :  Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Pengawasan Operasional Nelayan di wilayah Pesisir Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan Rapat Koordinasi Hamonisasi Alat Penangkapan Ikan	Produksi dan Sarana Pemberdayaan dan Usaha Perikanan Pemberdayaan dan Usaha Perikanan Produksi dan Sarana
						2.05	2.01.2	15			<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>  Kegiatan :  Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2	15	001			
						2.05	2.01.2	15	002			
						2.05	2.01.2	16			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</b>  Kegiatan :	



No.	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan	Bidang Penanggung Jawab
						2.05	2.01.2	16	002		Pembinaan Penumbuhkembangan dan Lomba Pokmaswas	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2	16	006		Pengadaan Dan Pemasangan Radio Komunikasi	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2	xx			<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil</b> Kegiatan :	
						2.05	2.01.2		01		Pembinaan dan Penumbuhkembangan kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2		02		Pelestarian Pura Segara sebagai Pura Swagina	Sekretariat
						2.01	2.01.2	20			<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan</b> Kegiatan :	
						2.01	2.01.2	20	001		Bimbingan Teknis Penyuluh dan Petugas Lapangan	Sekretariat
						2.01	2.01.2	20	002		Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Sekretariat
						2.05	2.01.2	30			<b>Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan</b> Kegiatan :	
						2.05	2.01.2	30	001		Pemutahiran Database Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung	Perencanaan dan Pengembangan
						2.05	2.01.2	30	002		Penyusunan Buku Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Perencanaan dan Pengembangan
						2.05	2.01.2	30	003		Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan dan Kelautan	Perencanaan dan Pengembangan
						2.05	2.01.2	xx			<b>Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata</b> Kegiatan :	
						2.05	2.01.2		003		Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2		004		Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2				Pembuatan Aplikasi Informasi Pemasaran/Trade Centere Produk Perikanan dan Kelautan	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2				Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2				Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan	Program / Kegiatan	Bidang Penanggung Jawab
				2 Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	1 Jumlah produksi olahan hasil perikanan	2.05	2.01.2	19			<b>Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat</b>	Sekretariat  Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
											Kegiatan :	
						2.05	2.01.2	19	001		Peringatan Hari Nusantara	
						2.05	2.01.2	19	002		Hari Ikan di Kabupaten Badung	
						2.01	2.01.2	23			<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan</b>	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan  Pemberdayaan dan Usaha Perikanan  Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
											Kegiatan :	
						2.01	2.01.2	23	001		Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah	
						2.01	2.01.2	23	002		Informasi Harga Daging dan Ikan	
						2.05	2.01.2	23			<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	
											Kegiatan :	
						2.05	2.01.2	23	001		Pembinaan Usaha Peternakan dan Perikanan	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2	23	002		Pembinaan pasar, Kios dan Pedagang Ikan	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
						2.05	2.01.2	34			<b>Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan</b>	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
											Kegiatan :	
						2.05	2.01.2		001		Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Pemberdayaan dan Usaha Perikanan

## **BAB VII PENUTUP**

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perikanan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**BUPATI BADUNG**

**I NYOMAN GIRI PRASTA**